

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PKL DI KABUPATEN BOJONEGORO
(STUDI PADA PKL ALUN-ALUN KABUPATEN
BOJONEGORO)**

*Evaluation Of The Impact Of The Policy On The Arrangement And
Empowerment Of Street Vendors In Bojonegoro District (Study On
Street Vendors In Bojonegoro District Square)*

Dwi Rizqita Zakiya¹, Agus Prastyawan²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
Email : dwirizqita.20007@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
Email : agusprastyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus pada PKL di kawasan Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro. Penataan PKL dilakukan guna menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Namun, kebijakan ini juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan baik bagi PKL maupun masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi dampak kebijakan oleh Samodra Wibawa, yang meliputi dampak individual, dampak organisasi, dampak masyarakat, dan dampak terhadap sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas dan estetika lingkungan di kawasan Alun-Alun. Namun, terdapat dampak negatif terhadap pendapatan PKL yang mengalami penurunan akibat kurang strategisnya lokasi baru. Di sisi lain masyarakat sekitar merasakan peningkatan kenyamanan dan ketertiban di ruang publik. Dampak terhadap lembaga pemerintahan juga teridentifikasi, dimana efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap PKL meningkat setelah mereka dipindahkan ke lokasi yang lebih terpusat. Kesimpulannya, kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal pemberdayaan ekonomi PKL. Maka, pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan fasilitas bagi para PKL di lokasi baru.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan, PKL

Abstract

This research aims to evaluate the impact of policies for structuring and empowering street vendors in Bojonegoro Regency, with a focus on street vendors in the Alun-Alun area of Bojonegoro Regency. The arrangement of street vendors is carried out to create order, beauty, security and comfort in the environment. However, this policy also has an impact on social,

economic and environmental conditions for both street vendors and the surrounding community. The research method used is descriptive qualitative. Data was collected through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using policy impact evaluation theory by Samodra Wibawa, which includes individual impacts, organizational impacts, community impacts, and impacts on social systems. The research results show that the policy of structuring and empowering street vendors has had a positive impact on improving traffic order and environmental aesthetics in the Alun-Alun area. However, there was a negative impact on street vendors' income which decreased due to the lack of strategic location of the new location. On the other hand, the local community feels an increase in comfort and order in publik spaces. The impact on government institutions was also identified, where the effectiveness of guidance and supervision of street vendors increased after they were moved to a more centralized location. In conclusion, this policy makes a positive contribution in creating a more orderly and safe environment, although improvements are still needed in terms of economic empowerment of street vendors. Therefore, the government is expected to pay more attention to sustainability aspects and facilities for street vendors in new locations.

Keywords: Policy Evaluation, Management and Empowerment, PKL

Pendahuluan

Eksistensi kegiatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di kawasan informal di pusat kota sering kali dipandang sangat dilematis. Sektor informal dalam hal ini adalah pedagang kaki lima (PKL), yaitu para PKL yang menjual barang dan jasa di tempat yang bergerak karena tidak memiliki lokasi tetap. Beberapa orang yang tidak terdaftar dalam sektor formal sering memilih untuk terlibat dalam sektor informal ini, mengingat fleksibilitas dan aksesibilitas yang ditawarkannya. Namun, pilihan ini juga membawa tantangan tersendiri, termasuk risiko ketidakpastian pendapatan dan kurangnya perlindungan hukum, sehingga situasi ini sering kali menimbulkan dilema bagi para PKL dalam menjalankan usaha mereka (Allam et al., 2019). Karena PKL tersebar hampir di seluruh wilayah, itu merupakan salah satu sumber masalah di perkotaan. Seringkali PKL dianggap sebagai penyebab tidak teraturnya lalu lintas, mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya, kesan kotor dan kumuh yang akan mempengaruhi kebersihan kota, belum lagi pelanggaran yang dilakukan oleh PKL terkait dengan penggunaan tempat berdagang tanpa izin (Satararuddin et al., 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah pedagang kaki lima (PKL) semakin meningkat dan bervariasi dalam bentuk serta layanan yang ditawarkan. Pertumbuhan pesat PKL ini membawa dampak positif, seperti peningkatan pendapatan daerah dan pengurangan angka pengangguran. Namun, di sisi lain, keberadaan mereka juga dapat mengganggu ketertiban, keindahan, dan kerapian jalan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah bijaksana untuk mengatasi masalah ini, mendorong PKL agar mematuhi peraturan yang ada, dan bekerja sama dalam menata lokasi berjualan mereka (Siregar & Ridwan, 2022). Dalam hal ini pemerintah telah membuat peraturan seperti, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Pasal 2 dan 3 dari Peraturan Presiden Mengenai PKL menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bekerja sama untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sangat penting untuk mengatasi masalah yang muncul akibat meningkatnya jumlah PKL di perkotaan. Dengan adanya program ini, perdagangan, sehingga tidak hanya mengurangi gangguan terhadap lalu lintas dan estetika kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penataan yang efektif melibatkan pembangunan fisik seperti infrastruktur yang memadai serta pembangunan non-fisik seperti perencanaan tata ruang dan regulasi perdagangan. Oleh karena itu, pemberdayaan PKL menjadi kunci untuk menata mereka sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian lokal tanpa mengabaikan kepentingan umum dan lingkungan sekitar. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan tercipta lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas bagi semua pihak.

Pembangunan fisik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara dengan melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dan bentuknya jelas. Dengan kata lain, perubahan itu berkaitan dengan keberadaan atau jenis pembangunan seperti adanya gedung, perumahan, tempat ibadah, jalan, sekolah dan sarana umum lainnya (Gultom & Tini, 2020). Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Jawa Timur, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan fisik, yang memiliki hubungan kompleks dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Di satu sisi, pembangunan infrastruktur baru menciptakan ruang dan peluang bagi PKL untuk berjualan. Namun, di sisi lain, keberadaan PKL dapat berdampak negatif terhadap estetika dan ketertiban kota yang telah dibangun. Seiring berjalannya waktu, masalah sosial seperti aktivitas PKL yang berjualan di lokasi yang tidak tepat semakin berkembang. Dengan adanya infrastruktur yang baik, keberlangsungan usaha PKL dapat terpengaruh secara positif, namun tantangan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota tetap harus dihadapi.

Masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) tidak hanya melibatkan aspek kebersihan, keindahan, keamanan, dan tata ruang kota, tetapi juga mencakup persoalan sosial yang lebih luas seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pengangguran, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan sosial lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan prioritas untuk menangani masalah PKL yang lebih mendalam demi menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warga (Rahayu, 2022). Keberadaan PKL di Kabupaten Bojonegoro semakin meningkat, terutama di wilayah Kecamatan Bojonegoro yang merupakan pusat perekonomian. PKL kerap dijumpai di jalan-jalan utama kecamatan Bojonegoro seperti Jl. Diponegoro, Jl. Teuku Umar, Jl. Gajah Mada, Jl. Ahmad Yani dan sekitarnya. Kebanyakan PKL menggunakan peralatan berdagang yang mudah untuk di bongkar pasang seperti gerobak sepeda dan mobil bak terbuka, maka tidak ada data pasti terkait PKL di area tersebut.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro mengganggu lalu lintas dan merubah fungsi area publik, karena mereka menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan. Aktivitas PKL di area tersebut tidak hanya mengurangi keindahan dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga mengganggu fungsi sosial sebagai tempat interaksi masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah sampah dari

aktivitas PKL, kebersihan Alun-Alun pun terancam. Oleh karena itu, perlu adanya penataan yang lebih baik untuk menjaga ketertiban dan fungsi asli ruang publik di kawasan tersebut. Meskipun telah ada larangan berjualan di area tertentu seperti Alun-Alun, banyak PKL yang tetap beroperasi di lokasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah meminta PKL untuk pindah ke lokasi yang telah disediakan, namun tantangan tetap ada karena PKL merasa lokasi baru kurang strategis dan sepi pengunjung. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan mengindikasikan perlunya solusi yang lebih efektif dalam penataan PKL di daerah tersebut. Meskipun pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan lokasi penataan dan pemberdayaan untuk pedagang kaki lima (PKL), banyak PKL yang menolak relokasi karena lokasi baru dianggap tidak strategis dan jauh dari aktivitas ekonomi. PKL yang sebelumnya ditata di Jl. Pattimura dan Jl. Panglima Polim kini kembali berjualan di tempat yang dilarang, seperti trotoar dan bahu jalan, menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan menciptakan pemandangan yang semrawut. Hingga tahun 2023, pelanggaran oleh PKL masih terus terjadi, menunjukkan perlunya tindakan lebih tegas dari pemerintah untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban serta kebersihan di kawasan tersebut.

Kekecewaan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan pemerintah terlihat dari perbedaan pandangan yang muncul antara mereka dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Meskipun ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, PKL tetap berpegang pada keinginan untuk kembali ke lokasi lama mereka, meskipun aturan baru telah diterapkan. Mereka berharap untuk mendapatkan lokasi yang lebih strategis daripada tempat yang ditawarkan pemerintah, yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, banyak PKL yang kembali berjualan di lokasi sebelumnya, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Penolakan ini menciptakan kesan bahwa kebijakan hanya menguntungkan pemerintah, sementara para PKL merasa diabaikan. Perbedaan lokasi dan kondisi tempat berjualan sangat memengaruhi pendapatan PKL, sehingga penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka dalam perencanaan kebijakan.

Penelitian oleh (Al Azubi, 2019) mengenai evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Taman Kuliner Pengayoman, Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan beberapa manfaat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM serta SATPOL PP telah menjalankan penataan PKL sesuai peraturan yang ada. Kebijakan ini bertujuan untuk memperindah tata ruang kota dan meningkatkan pendapatan PKL, yang kini merasa lebih aman dari penindakan karena memiliki lokasi berjualan yang legal, meskipun masih bersifat kontrak. Beberapa PKL di luar area Taman Kuliner juga berharap adanya tambahan ruang informal. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berjalan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), tanpa menimbulkan kerusuhan selama proses penertiban.

Penelitian kedua oleh (Fachrunissa et al., 2021) yaitu tentang Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Makassar. menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum efektif secara keseluruhan, terutama di kawasan Kanrerong. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menata dan memberdayakan PKL, tidak

semua PKL merasakan manfaat yang sama dalam peningkatan pendapatan mereka. Beberapa PKL masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lokasi baru yang disediakan, yang sering kali dianggap kurang strategis untuk menarik pelanggan. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan PKL, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari PKL dan melakukan dialog yang konstruktif untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Dengan melibatkan PKL dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, diharapkan kebijakan penataan dan pemberdayaan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka tanpa mengabaikan aspek ketertiban dan keindahan kota.

Penulis tertarik dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai permasalahan. Pertama, banyaknya pedagang termasuk fasilitas umum dan tempat yang bukan peruntukannya seperti Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan lalu lintas, menciptakan kesan berantakan di area publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berusaha menata lokasi PKL, masih ada pedagang yang enggan berpindah karena merasa lebih nyaman di lokasi lama. Kedua, terdapat penurunan pendapatan pedagang kaki lima saat berjualan di lokasi yang ditentukan pemerintah. Lokasi penataan yang disediakan pemerintah untuk PKL dianggap kurang strategis dan sepi pembeli, sehingga berdampak negatif pada pendapatan mereka. Ketiga, meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih banyak PKL yang tetap berjualan di lokasi lama karena menganggap lokasi baru tidak menguntungkan. Resistensi terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang perlu ditangani agar penataan dapat berjalan efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan dan peluang dalam kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam penataan PKL, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki program serta memastikan dukungan yang memadai bagi semua pihak. Program edukasi mengenai manfaat penataan serta pelatihan manajemen usaha bagi PKL dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan pendapatan mereka di lokasi baru. Dengan pendekatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan PKL dapat membaik, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara lengkap, secara mendalam dan sistematis tentang Evaluasi Dampak Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan PKL Di Kabupaten Bojonegoro khususnya pada PKL Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi dampak menurut Samodra Wibawa untuk mengetahui bagaimana kaki lima (PKL) yang masih melakukan kegiatan berdagang dengan memanfaatkan area yang Evaluasi Dampak Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan PKL Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada PKL Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro). Teori evaluasi dampak menurut Samodra Wibawa memiliki 4 indikator yaitu Dampak individual

(dampak lingkungan, dampak psikis, dampak ekonomi, dampak sosial), Dampak Organisasional, Dampak Terhadap Masyarakat, dan Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial. Pada penelitian ini memiliki sumber data berupa data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Individual

a. Dampak Lingkungan

Hasil penelitian mengenai dampak lingkungan menunjukkan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro berhasil menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan teratur. Masyarakat melaporkan bahwa kondisi saat ini lebih nyaman, dengan Alun-Alun yang semakin bersih dan tidak ada sampah yang berserakan seperti sebelumnya. Namun, meskipun penataan di Alun-Alun menunjukkan hasil positif, kondisi di lokasi baru, yaitu PKL Berkah, menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Banyak PKL yang berpindah ke lokasi baru melaporkan bahwa area tersebut kini terlihat kumuh dan tidak terawat, dengan banyak tempat kosong yang beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan barang-barang. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak tenda PKL yang kosong dan tidak terawat, menciptakan kesan tidak rapi dan mengurangi daya tarik lokasi bagi pengunjung. Hal ini menjadi tantangan bagi para PKL untuk menarik pelanggan, karena suasana yang kumuh dan tidak teratur membuat orang merasa kurang nyaman untuk berkunjung. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa kondisi kebersihan di lokasi PKL Berkah lebih baik dibandingkan sebelumnya di Alun-Alun, tetapi tantangan dalam menjaga kebersihan memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk para pedagang. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Namun, tantangan dalam pengelolaan lokasi baru perlu diatasi agar dampak positif ini dapat berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan PKL dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan kondisi lingkungan dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pedagang kaki lima.

Dari hasil ini, jelas bahwa keberhasilan penataan tidak hanya bergantung pada pemindahan fisik PKL ke lokasi baru tetapi juga pada upaya berkelanjutan dalam menjaga kebersihan dan keteraturan area tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan bagi para PKL tentang pentingnya menjaga kebersihan serta cara-cara untuk merawat fasilitas yang ada. Dengan demikian, keberhasilan penataan dapat dirasakan oleh semua pihak dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

b. Dampak Psikis

Hasil penelitian mengenai dampak psikis dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kondisi mental dan emosional para PKL. Banyak PKL mengalami kecemasan dan ketidakpastian saat harus berpindah ke lokasi baru, PKL Berkah, setelah sebelumnya merasa nyaman di Alun-Alun meskipun tidak legal. Ketika

kebijakan penataan diumumkan, mereka mulai merasakan tekanan dan khawatir tentang pendapatan di lokasi baru. Dampak psikis ini terlihat dari kecemasan yang dialami PKL saat beradaptasi, di mana mereka khawatir kehilangan pelanggan tetap. Namun, seiring waktu, banyak PKL yang mulai beradaptasi dan merasakan kenyamanan di lokasi baru. Mereka menyadari bahwa status legal memberikan rasa aman dan perlindungan dari penertiban yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya terdapat resistensi terhadap perubahan, adaptasi dapat terjadi jika ada dukungan yang tepat. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro juga menyadari dampak psikis ini dan berusaha memberikan dukungan yang diperlukan melalui program bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan para pedagang

Penelitian ini menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental para pedagang. Dukungan sosial dari sesama PKL berperan penting dalam mengurangi dampak negatif dari kecemasan yang mereka alami. Interaksi positif antara pedagang dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, di mana mereka saling berbagi pengalaman dan strategi untuk menghadapi tantangan baru. Dengan begitu, rasa solidaritas di antara mereka dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat penataan kepada para PKL. Edukasi tentang keuntungan jangka panjang dari lokasi baru dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan tersebut. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tujuan penataan, pemerintah dapat membangun kepercayaan di antara para pedagang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL memiliki dampak psikis yang kompleks. Meskipun ada tantangan awal berupa kecemasan dan ketidakpastian, banyak PKL yang berhasil beradaptasi dengan dukungan sosial dan program pemerintah. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental para pedagang harus menjadi bagian integral dari kebijakan penataan agar keberhasilan jangka panjang dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan penataan tidak hanya mempengaruhi aspek fisik tetapi juga kondisi mental para pedagang. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mendengarkan kebutuhan psikologis pedagang serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru.

c. Dampak Ekonomi

Hasil penelitian mengenai dampak ekonomi dari kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha para PKL. Sebelum penataan, pendapatan harian PKL di Alun-Alun berkisar antara Rp700.000 hingga Rp1.000.000, terutama saat ada acara atau keramaian. Namun, setelah penataan dan relokasi ke lokasi baru, PKL Berkah, banyak PKL melaporkan penurunan pendapatan yang drastis. Salah satu PKL menyatakan bahwa dulu omset yang diperoleh per hari bisa mencapai hampir Rp700.000, tetapi sekarang setelah dipindah ke lokasi baru menjadi menurun drastis. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun penataan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dampak negatif terhadap pendapatan para PKL menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan pendapatan yang dialami oleh PKL di lokasi baru mencapai sekitar 71,43%, mencerminkan kesulitan dalam menarik pelanggan di lokasi yang kurang strategis. Banyak PKL merasa lokasi baru tidak

sepopuler lokasi sebelumnya, sehingga jumlah pengunjung berkurang. Salah satu PKL menambahkan bahwa promosi yang dilakukan pemerintah pada awal setelah peresmian lokasi PKL Berkah memang sangat berdampak, tetapi setelah beberapa bulan sudah tidak ada kegiatan lagi, sehingga lokasi jadi sepi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan penataan tidak hanya bergantung pada pemindahan fisik tetapi juga pada strategi pemasaran dan promosi yang berkelanjutan untuk menarik konsumen ke lokasi baru. Tanpa adanya upaya promosi yang berkelanjutan, potensi pendapatan para PKL akan terus menurun.

Dari perspektif pemerintah, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro berusaha memberikan pelatihan dan pendampingan kepada PKL untuk meningkatkan keterampilan manajemen usaha dan pemasaran. Meskipun ada upaya dari pemerintah, tantangan dalam meningkatkan pendapatan tetap menjadi perhatian utama. Pelatihan yang diberikan perlu lebih terfokus pada kebutuhan spesifik para pedagang agar mereka dapat beradaptasi dengan baik di lokasi baru dan memaksimalkan potensi pendapatan mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL memiliki dampak ekonomi yang kompleks. Penurunan pendapatan yang dialami oleh banyak pedagang menjadi masalah yang perlu diatasi melalui dukungan pemerintah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi program pemberdayaan serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan penataan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para PKL dan masyarakat secara keseluruhan.

d. Dampak Sosial

Hasil penelitian mengenai dampak sosial dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan perubahan signifikan dalam interaksi sosial antara PKL dan masyarakat. Penataan PKL di Alun-Alun dan lokasi baru (PKL Berkah) tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik lingkungan, tetapi juga hubungan sosial di antara pedagang dan masyarakat. Melalui wawancara dan observasi, ditemukan bahwa penataan PKL meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di ruang publik. Masyarakat merasa lebih aman beraktivitas di Alun-Alun setelah penataan, dengan salah satu warga menyatakan bahwa setelah adanya penataan PKL, sekarang lebih merasa aman dan tertib.

Namun, penelitian juga menemukan kecemburuan sosial di antara PKL akibat perbedaan lokasi yang diberikan. Beberapa PKL merasa lokasi baru kurang strategis dan menyebabkan persaingan tidak sehat. Hal ini menciptakan ketegangan di antara pedagang yang berada di lokasi yang lebih ramai dengan mereka yang berada di lokasi sepi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penataan bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, tantangan dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis di antara PKL tetap ada. Selain itu, interaksi sosial yang positif juga terlihat dari upaya kolaborasi antara pemerintah dan PKL dalam menjaga kebersihan dan ketertiban area publik. Banyak pedagang yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan, yang menunjukkan peningkatan rasa kepemilikan terhadap ruang publik mereka. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kebersihan tetapi juga memperkuat ikatan antar pedagang serta hubungan mereka dengan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki dampak sosial yang kompleks.

Meskipun ada peningkatan dalam ketertiban dan rasa aman di ruang publik, tantangan seperti kecemburuan sosial dan resistensi terhadap lokasi baru perlu ditangani secara serius. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan PKL dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling mendukung menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dari kebijakan penataan ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kebijakan penataan PKL tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada interaksi sosial antarwarga. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua pedagang merasa diperhatikan dan terlibat dalam proses penataan agar tujuan utama dari kebijakan ini dapat tercapai secara optimal.

2. Dampak Organisasional

Hasil penelitian mengenai dampak organisasional dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kebijakan ini telah meningkatkan efektivitas lembaga pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PKL. Penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada struktur dan fungsi organisasi yang terlibat dalam pengelolaan PKL. Salah satu temuan utama adalah bahwa setelah penataan, pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PKL. Kepala Dinas menyatakan bahwa dengan adanya penataan ini, mereka dapat lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengawasan karena PKL kini terpusat di lokasi PKL Berkah. Hal ini menunjukkan bahwa penataan PKL telah menciptakan struktur yang lebih terorganisir, sehingga memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam menjaga kepatuhan PKL terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun banyak PKL yang mematuhi kebijakan, masih ada beberapa yang merasa lokasi baru kurang strategis dan memilih untuk kembali ke lokasi lama. Salah satu PKL mengungkapkan bahwa para pedagang merasa lebih nyaman di lokasi lama meskipun tidak legal, karena lebih banyak pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penataan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, tantangan dalam menjaga kepatuhan PKL tetap ada. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan agar semua pihak merasa terlibat dan diperhatikan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak organisasional dari kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan PKL. Penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus mampu meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, penataan PKL tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keindahan lingkungan, tetapi juga meningkatkan hubungan antara pemerintah dan PKL. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak, diharapkan akan tercipta sinergi yang positif dalam pengelolaan PKL.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak organisasional yang positif. Meskipun ada tantangan dalam menjaga kepatuhan PKL, penataan ini telah meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan penataan PKL terhadap struktur organisasi pemerintah serta pentingnya dukungan dan kolaborasi antara pemerintah dan PKL dalam mencapai tujuan bersama. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat terus memberikan manfaat bagi PKL dan meningkatkan efektivitas

organisasi pemerintah di masa depan.

3. Dampak Terhadap Masyarakat

Hasil penelitian mengenai dampak terhadap masyarakat dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitar Alun- Alun. Penataan PKL tidak hanya berfokus pada pengelolaan pedagang, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan ketertiban di ruang publik. Salah satu temuan utama adalah bahwa masyarakat merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas di Alun-Alun setelah penataan. Warga yang sering menggunakan Alun-Alun untuk berolahraga dan bersantai melaporkan bahwa setelah adanya penataan PKL, mereka kini lebih merasa aman dan tertib, sehingga bisa jogging mengelilingi Alun-Alun dengan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa penataan PKL berhasil mengembalikan fungsi ruang publik yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat menggunakan area tersebut untuk berbagai aktivitas sosial tanpa merasa terganggu oleh keberadaan PKL yang tidak teratur.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada peningkatan kenyamanan, beberapa masyarakat masih merasakan dampak negatif dari kebijakan ini. Beberapa PKL yang tidak berpindah ke lokasi baru memilih untuk menyewa ruko di sekitar Alun-Alun, dan mereka melaporkan peningkatan pendapatan setelah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu PKL yang menyewa ruko menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan penataan, ia bisa lebih berkembang karena bisa mengikuti pelatihan yang membangun potensi dan menambah keterampilan, sehingga kini dapat membuka lapangan kerja baru. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada PKL yang berpindah, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka yang memilih untuk tetap berjualan di lokasi yang lebih strategis. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak terhadap masyarakat dari kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya bermanfaat bagi PKL, tetapi juga bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum. Masyarakat yang sebelumnya merasa terganggu dengan keberadaan PKL kini dapat menikmati ruang publik dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak positif terhadap masyarakat, dengan meningkatkan kenyamanan dan ketertiban di ruang publik. Namun, tantangan dalam menjaga hubungan yang harmonis antara PKL dan masyarakat perlu diatasi untuk menciptakan interaksi sosial yang lebih positif. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan penataan PKL terhadap masyarakat, serta pentingnya dukungan dari pemerintah dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan PKL di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah perlu melanjutkan program-program pemberdayaan bagi para pedagang serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari penataan ini secara berkelanjutan.

4. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Hasil penelitian mengenai dampak terhadap lembaga dan sistem sosial dari kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap fungsi dan kinerja lembaga pemerintah serta interaksi sosial di masyarakat. Penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penataan PKL telah meningkatkan efektivitas Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PKL. Kepala Dinas menyatakan bahwa dengan adanya penataan ini, kami dapat lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengawasan karena PKL kini terpusat di lokasi PKL Berkah. Hal ini menunjukkan bahwa penataan PKL telah menciptakan struktur yang lebih terorganisir, sehingga memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam menjaga kepatuhan PKL terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun banyak PKL yang mematuhi kebijakan, masih ada beberapa yang merasa lokasi baru kurang strategis dan memilih untuk kembali ke lokasi lama. Salah satu PKL mengungkapkan bahwa beberapa pedagang merasa lebih nyaman di lokasi lama meskipun tidak legal, karena lebih banyak pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penataan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, tantangan dalam menjaga kepatuhan PKL tetap ada, yang dapat mempengaruhi efektivitas lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak terhadap lembaga dan sistem sosial dari kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan PKL. Penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus mampu meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, penataan PKL tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keindahan lingkungan, tetapi juga meningkatkan hubungan antara pemerintah dan PKL. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, diharapkan akan tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL di Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak positif terhadap lembaga dan sistem sosial. Meskipun ada tantangan dalam menjaga kepatuhan PKL, penataan ini telah meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan penataan PKL terhadap struktur organisasi pemerintah, serta pentingnya dukungan dan kolaborasi antara pemerintah dan PKL dalam mencapai tujuan bersama. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat terus memberikan manfaat bagi PKL dan meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah di masa depan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, keempat indikator Evaluasi Dampak menurut Samodra Wibawa yaitu Dampak Individual, Dampak Organisasional, Dampak Terhadap Masyarakat, dan Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial menunjukkan berbagai dampak yang beragam dan signifikan. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Individual

Pada indikator ini menunjukkan dampak signifikan dan beragam, baik positif maupun negatif. Penataan PKL berhasil menciptakan kawasan Alun-Alun yang lebih bersih dan teratur, meningkatkan estetika dan kenyamanan bagi masyarakat. Namun,

tantangan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan lokasi baru (PKL Berkah) memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk para pedagang. Dampak psikis muncul sebagai rasa cemas yang dirasakan oleh PKL saat berpindah ke lokasi baru, tetapi seiring waktu, mereka mulai merasakan kenyamanan setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dampak ekonomi terlihat dari penurunan pendapatan PKL yang rata-rata mencapai sekitar 71,43% setelah penataan, mencerminkan tantangan dalam menarik pelanggan di lokasi baru. Dampak sosial terlihat dari peningkatan interaksi sosial dan kenyamanan masyarakat, meskipun ada kecemburuan sosial di antara PKL. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman, tetapi masih memerlukan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Dampak Organisasional

Pada indikator ini menunjukkan peningkatan efektivitas lembaga pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan PKL. Dengan penataan yang membuat lokasi PKL lebih terpusat, pemerintah daerah dapat lebih mudah memantau aktivitas mereka dan melaksanakan program pemberdayaan seperti bimbingan teknis dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Meskipun hubungan antara pemerintah dan PKL membaik, perhatian lebih diperlukan terhadap pemberdayaan ekonomi PKL, terutama mengingat penurunan pendapatan akibat lokasi baru yang kurang strategis. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki program serta memastikan dukungan yang memadai bagi semua pihak.

3. Dampak Terhadap Masyarakat

Pada indikator ini menunjukkan dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat setelah penataan PKL dari Alun-Alun ke lokasi PKL Berkah. Masyarakat merasa lebih nyaman beraktivitas, seperti berolahraga, karena Alun-Alun kini lebih tertib. Ketertiban umum meningkat, dengan berkurangnya kendaraan yang diparkir di bahu jalan, sehingga masyarakat dapat lebih leluasa beraktivitas. Ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam menciptakan ruang publik yang mendukung interaksi sosial. Selain itu, ex PKL yang memilih menyewa kios di sekitar Alun-Alun juga merasakan dampak positif, karena kebijakan ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan membuka lapangan kerja baru.

4. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Pada indikator ini menunjukkan dampak positif terhadap lembaga, terutama Satpol PP,

yang lebih mudah memantau aktivitas PKL setelah mereka dipindahkan ke lokasi baru. Hal ini mengurangi kemacetan dan kerumunan di Alun-Alun, serta meningkatkan efektivitas pembinaan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. Meskipun pengawasan meningkat, masih ada kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap pendapatan PKL di lokasi baru yang kurang strategis. Selain dampak terhadap lembaga juga terdapat dampak sistem sosial yang dirasakan oleh PKL, dengan adanya kebijakan ini mereka merasa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya memikirkan dampak jangka panjang untuk PKL setelah berdagang di lokasi baru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi program dan memberikan dukungan yang memadai bagi PKL.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai Evaluasi Dampak Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan PKL Di Kabupaten Bojonegoro Studi Pada Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu merealisasikan peningkatan fasilitas melalui perbaikan sarana prasarana di lokasi baru, seperti tenda untuk PKL dan penambahan pepohonan atau peneduh guna menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi PKL dan pengunjung.
2. Dalam mengatasi penurunan omset yang diperoleh para PKL, setiap PKL perlu meningkatkan promosi menggunakan platform media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram untuk memperkenalkan produk yang ada di lokasi PKL Berkah, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Dalam mengatasi persaingan antar PKL, pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan penataan lokasi PKL secara merata dengan rotasi lapak PKL secara berkala untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua PKL.
4. Pemerintah sebaiknya menyediakan program pelatihan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan interpersonal dan manajemen stres, serta membentuk kelompok dukungan antar pedagang untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan.
5. Mengintensifkan pengawasan PKL (baru maupun lama) yang kembali ke lokasi Alun- Alun Kabupaten Bojonegoro.

Referensi

- Al Azubi, M. S. (2019). *EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA(PKL) DI TAMAN KULINER PENGAYOMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 KABUPATEN TEMANGGUNG*. Muhammad Sahaludin Al Azubi.
- Allam, M. A., Rahajuni, D., Ahmad, A. A., & Binardjo, G. (2019). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR SUNDAY MORNING (SUNMOR) PURWOKERTO. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 21.

- Fachrunissa, R., Susanti, G., & Yani, A. A. (2021). *Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam : Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Rahayu, A. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL (STUDI KASUS : PKL PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI)*.
- Satararuddin, Suprianto, & Daeng, A. (2020). Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2.
- Siregar, M. R., & Ridwan, M. (2022). EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN. *SIBATIK JOURNAL*, 1.